

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan suatu negara maupun daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, keberhasilan di bidang keamanan dan sebagainya. Dari berbagai bidang tersebut, salah satu bidang yang paling penting dan menjadi sorotan masyarakat adalah keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah).

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju, sehingga pengalokasian belanja modal juga dipertanyakan. Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan tidak serta merta untuk belanja modal saja. Pergeseran pola belanja ini yang menjadi permasalahan krusial di pemerintah daerah mengingat sejauh mana pentingnya diadakan pendanaan untuk belanja modal. Motivasi yang melandasi penelitian ini antara lain adanya pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal.

Dalam beberapa tahun terakhir, disejumlah daerah termasuk di Provinsi Jawa Barat, belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dari data yang diperoleh, alokasi belanja pegawai terus naik terutama di Jawa dan Sumatra. Di Jawa dari Rp 82,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 178,3 triliun pada 2019 dan Sumatra dari Rp 53,2 triliun menjadi Rp 108,8 triliun. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, realisasi belanja modal masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan realisasi total belanja di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 s.d. 2019.

Untuk mengetahui lebih rinci, berikut ini rasio belanja modal di Provinsi Jawa Barat dari tahun anggaran 2015 s.d. 2019 pada tabel 1.1 :

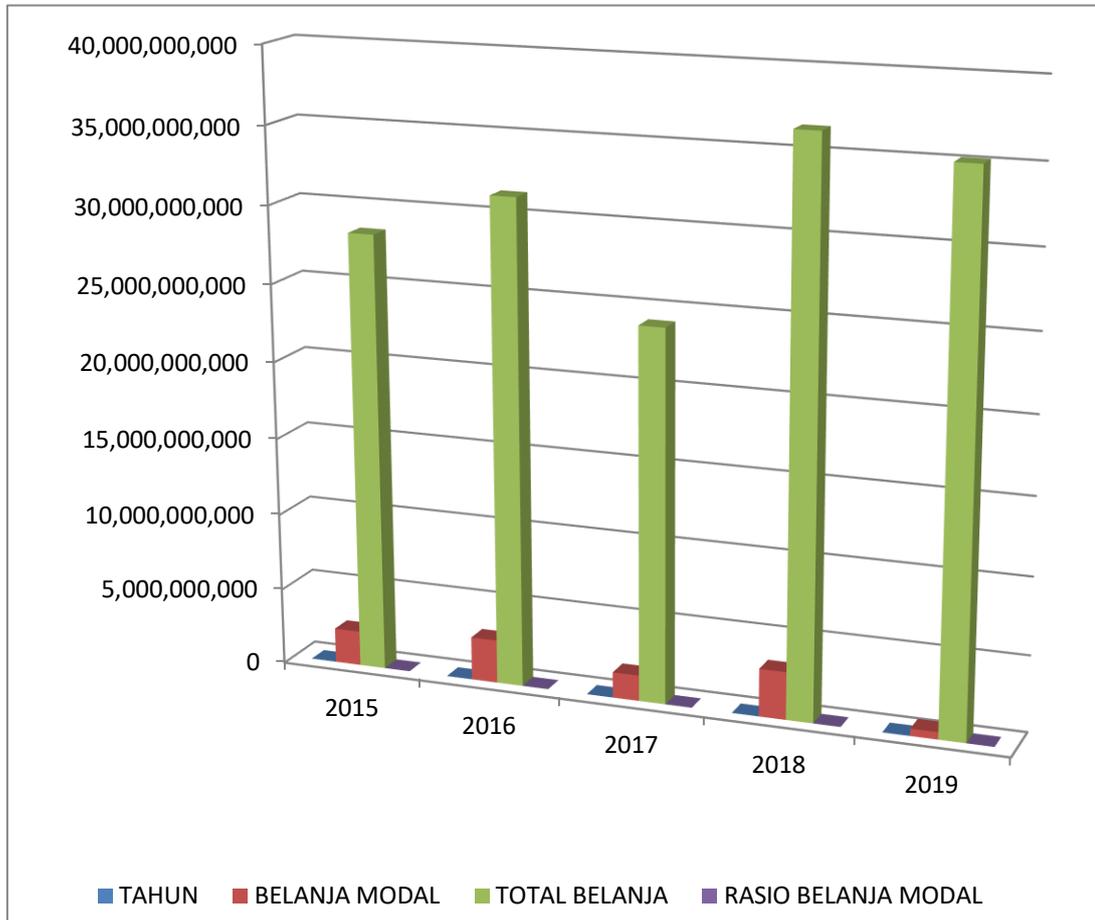
Tabel 1.1
Rasio Belanja Modal Provinsi Jawa Barat 2015-2019* (Ribuan Rupiah)

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	RASIO BELANJA MODAL
2015	2.298.676.130,21	28.366.703.247,66	8,10%
2016	2.859.355.623,56	31.344.462.321,49	9,12%
2017	1.693.276.733,94	24.054.880.848,03	7,04%
2018	3.145.847.260,32	36.482.714.855,46	8,62%
2019	481.846.388,00	35.145.346.810,00	1,37%

Sumber: [Http://jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id) (data diolah)

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa dari Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah rasio belanja modal dari tahun 2015 s.d. 2019 masih terhitung rendah yakni dibawah 10% dari total belanja Provinsi Jawa Barat. Dari tahun 2015 s.d. 2019, tercatat rasio belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni Rp. 2.859.355.623,56, hanya mencapai 9,12% dari total belanja Provinsi Jawa Barat yang berjumlah Rp. 31.344.462.321,49. Adapun rasio belanja modal terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 481.846.388,00 yang hanya mencapai 1,37% dari total belanja Provinsi Jawa Barat yang mencapai 35.145.346.810,00 . Penurunan yang terjadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 merupakan penurunan rasio belanja modal yang paling signifikan, yakni dari 8,62% menurun drastis menjadi 1,37% dari total belanja Provinsi Jawa Barat. Berikut ini gambaran belanja modal apadibandingkan dengan total belanja di Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2015 s.d. 2019

pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Perbandingan Belanja Modal dan Total Belanja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2015 s.d. 2019

Hal ini dibahas pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang mengemukakan bahwa masih terdapat catatan dari BPK yang menemukan 9 kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari 9 catatan yang diberikan BPK RI yaitu terkait penganggaran belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai ketentuan.

Hal yang disorot diantaranya yaitu rendahnya realisasi belanja modal yang hanya Rp. 2,53 triliun dari Rp. 3,26 triliun yang dianggarkan. Juga realisasi belanja transfer ke kabupaten/kota yang masih rendah sebesar Rp. 13,39 triliun dari anggaran Rp. 14,38 triliun. Rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di daerah khususnya pembangunan infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu, seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah pada belanja modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis memilih Kabupaten dan Kota di Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dan mempunyai pembagian kerjasama antar daerah yang cukup jelas.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan daerah dan belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan daerah dan belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
2. Pengaruh efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan daerah dalam hal pengalokasian belanja modal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintah sehingga masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan secara optimal.
3. Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam manajemen keuangan daerah serta menambah kemampuan untuk menganalisis tentang kinerja keuangan APBD selama periode yang telah ditentukan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah untuk memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam hal mengukur dan menganalisa kinerja keuangan dan pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Barat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Jadwal dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui pengumpulan data-data yang tersedia secara online yang didapatkan dari website resmi pemerintah yaitu *djpk.kemenkeu.go.id* dan *jabar.bps.go.id* tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pengumpulan data
3. Pelaksanaan penelitian
4. Analisis data
5. Penyusunan laporan

Berdasarkan langkah-langkah di atas maka agenda penelitian disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

AKTIVITAS	BULAN											
	Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli	
	I/II	III/IV	I/II	III/IV	I/II	III/IV	I/II	III/IV	I/II	III/IV	I/II	III/IV
Persiapan												
Pengumpulan data												
Pelaksanaan penelitian												
Analisis data												
Penyusunan laporan												
Persiapan sidang												

